

Salafi-Wahabi vs NU (Pertentangan Keberadaan STAI Ali bin Abi Thalib di Semampir Surabaya)

Raudatul Ulum

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Email : gelombanglaut@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 1 Maret 2016, diseleksi tanggal 27 Mei 2016 dan direvisi 5 Juni 2016

Abstract

The dispute between the adherents of Salafi-Wahabi and Nahdlatul Ulama often occurs in various places in Indonesia. The perspectives of the two groups are different and difficult to collaborate. This is also the case in the sub-district of Semampir – east Java when the people of Kecamatan Semampir – Desa Sidotopo Kidul – East Java rejected violently the establishment of the STAI Ali Bin Abi Thalib – an educational institutions founded by Salafi-Wahabi adherents. This study was conducted to understand the various issues concerning the causes of the conflict and what efforts have been made by the Ministry of Religious Affairs to elaborate that dissidents. Through observation techniques and in-depth interviews with the people who involved in the conflict, we conclude that the main problem of the conflict are due to differing opinions about religious understanding and theological concept. The Salafi-Wahabi-affiliated institution criticized the traditions of NU through the publication of newsletter and bulletin, radio broadcasting and Friday sermons. The disagreement of the two parties, Salafi Wahabi and NU, is derived from their missionary endeavor and religious attitudes which are extremely contradictory and difficult to compromise. This study provides recommendations to stakeholders such as Ministry of Religious Affairs – East Java government and other civil society organizations working in the field of religion to continue the discussions, dialogues and other effective communication methods in order to unify and resolve the conflict.

Keywords: NU, religious tradition, Salafi Wahabi, religious conflict, East Java.

Abstrak

Perseteruan antara aliran keagamaan Salafi Wahabi dengan Warga NU kerap kali terjadi pada berbagai segmen dan tempat di Indonesia. Konsepsi yang dibangun dalam menjalankan dakwah masing-masing kelompok berbeda dan sulit dipertemukan, begitu pula terhadap hal yang terjadi di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Dua pihak berbeda aliran mengalami gesekan yang memuncak pada aksi penolakan keberadaan lembaga Salafi Wahabi STAI Ali bin Abi Thalib oleh warga Sidotopo Kidul Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami berbagai hal menyangkut sebab musabab konflik itu terjadi sampai dengan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk menangani gesekan sosial tersebut. Melalui teknik pengamatan dan wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik dapat dipahami kalau aspek perbedaan pada pemahaman teologis adalah masalah utama, khususnya munculnya pendapat yang anti tradisi keagamaan NU melalui bulletin, khotbah jumat dan siaran radio STAI Ali bin Abi Thalib. Pola dakwah dan sikap keagamaan dua kelompok sangat bertentangan sehingga sulit ditemukan jalan keluarnya, pola dakwah NU yang inklusif dengan budaya lokal bahkan cenderung akomodatif berlawanan dengan salafi wahabi yang menginginkan pemurnian Islam dari segala bentuk pengaruh tradisi dan budaya. Masing-masing bersikeras cara keberagamaan masing-masing yang paling benar. Penelitian ini akhirnya memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak terkait terutama Kementerian Agama Jawa Timur dan Kota Surabaya, serta Pemda Kota Surabaya untuk terus melakukan dialog dan langkah-langkah positif dengan terus membangun komunikasi kepada kedua belah pihak, aspek mediasi cukup bermanfaat meredakan ketegangan.

Kata kunci: Tradisi Keagamaan, NU, Salafi Wahabi, Jawa Timur.

Pendahuluan

Kota Surabaya pada tanggal 7 Februari 2015 di bagian utara telah terjadi suatu peristiwa konflik antarliran dalam Islam, ditandai dengan adanya aksi demonstrasi menentang keberadaan STAI Ali Bin Abi Thalib yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Kelurahan Sido Topo. Penentangan yang dilakukan oleh warga di sekitar Ma'had Ali (Kampus) STAI Ali Bin Abi Thalib tersebut disebabkan terbitnya *bulletin* jum'at Al Iman yang mensyirikkan, membid'ahkan tradisi keagamaan masyarakat sekitar seperti jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) pada umumnya.

Pihak STAI telah melakukan beberapa kali klarifikasi dan meminta maaf, serta mediasi dilakukan pihak pemerintah dari tingkat camat sampai dengan gubernur Jawa Timur. Namun, semua proses mediasi belum menemukan titik temu (sesuai dengan surat gubernur Jawa Timur yang dikirimkan kepada Menteri Agama).

Pihak-pihak yang menolak mengatasnamakan Forum Warga Sidotopo, Ikatan Keluarga Madura (IKAMRA), MWC NU Semampir, menuntut pembubaran STAI Ali Bin Abi Thalib. Pada perkembangan selanjutnya mereka meminta kampus tersebut dipindahkan dari lokasi Sidotopo Kidul. Kelompok penentang memberikan batas waktu pembubaran pada tanggal 7 Mei 2015. Namun sebelum aksi pembubaran pada batas waktu yang dimaksud dapat dicegah oleh berbagai pihak, baik kepolisian, perangkat pemerintahan kota Surabaya dan provinsi Jawa Timur, serta TNI AD (Danrem 084 Baskara Jaya).

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memahami sebab perseteruan yang terjadi antara warga NU Sidotopo Kidul dengan STAI Ali Bin Abi Thalib. Penelitian bersifat kualitatif investigatif dengan penekanan pencarian fakta-fakta

dan sebab suatu kejadian. Informan merupakan pihak yang diyakini terlibat dalam suatu kejadian. Para informan terdiri dari pihak-pihak penentang/ penolak keberadaan STAI Ali bin Abi Thalib yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat Sidotopo Kidul, 1) H Sulton/H Abd Wali, 2) K.H. Ahmad Rosidi, 3) K.H. Murobi, 4) Ustadz Hafidz, Ketua MWC NU Semampir), 5) Ustadz Haji Ismail, 6) Ustadz Badruzzaman, 7) Haji Abd. Rahman, 8) Ustadz Amir Mahmud, 9) H. Mat Barah, 10) H. Adras. Wawancara juga dilakukan kepada pihak-pihak pengurus STAI Ali Bin Abi Thalib itu sendiri, 1) Ustadz Mubarak Bamualim, 2) Slamet Mulyono, 3) Ustadz Mulyono. Sedangkan informan lain yang diwawancarai adalah Kepala Seksi Binsyar Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur Ersyad dan Kepala TU Kementerian Agama Kota Surabaya, Kepala KUA Semampir serta penyuluh agama Munawar. Informan dari pemerintahan kota Surabaya adalah Camat Semampir, Siti Hindun Robba.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dalam kasus penentangan keberadaan STAI Ali Bin Abi Thalib, Pihak Pengurus STAI, pejabat pemerintahan dari Kementerian Agama kota Surabaya dan Camat Semampir Kota Surabaya. Selain wawancara, juga dilakukan analisis dokumen tertulis berkaitan dengan fakta kejadian, dengan harapan ada peluang lebih besar memahami persoalan atas kasus, verifikasi sebab-sebab kejadian dan bangunan nalar konfliknya.

Dalam penelitian ini juga dilakukan sedikit pengamatan. Mengingat desain penelitian tidak memungkinkan pengamatan dalam jangka waktu yang lama, namun teknik ini cukup membantu memahami kondisi lapangan terutama posisi gedung dan keberadaan masyarakat sekitar. Untuk menambah pemahaman terhadap unit analisis,

peneliti juga menggunakan studi dokumentasi yang sekaligus menjadi alat triangulasi terhadap hasil wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif berbasis studi kasus, menekankan pada narasi dan nalar fenomenologis. Hal tersebut disebabkan dengan sifat penelitian actual yang dilakukan dengan investigasi, tidak didasarkan pada asumsi atau preposisi tertentu.

Hasil dan Pembahasan

Letak geografis STAI Ali bin Abi Thalib berada Kecamatan Semampir yang merupakan bagian utara Kota Surabaya. Kecamatan Semampir cukup unik karena beberapa kasus serupa seringkali terjadi, tepatnya di Kelurahan Sidotopo Kidul. Sebagian besar penduduk Kecamatan Semampir adalah suku Madura dan suku Jawa, mereka keseharian rata-rata menggunakan bahasa Madura. Tingkat kemiskinan di kecamatan ini merupakan yang tertinggi di kota Surabaya. Sebagian besar penduduk di Semampir bermata pencaharian sebagai buruh dan tukang (20.874 jiwa), (<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/index.php>, diakses 19 Oktober 2015).

STAI Ali Bin Abi Thalib

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, *website* dan dokumen tentang STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya adalah perguruan tinggi Islam Swasta di Indonesia yang berada Surabaya. STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya ini didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI: Dj.I/495/2007 (<http://stai-ali.ac.id/profil/sejarah-singkat/>, diakses 15 Oktober 2015).

Sebelum berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, berdirilah sebuah lembaga pengajaran bahasa Arab

dan Ilmu-ilmu Islam yang dikenal dengan nama Ma'had Ali Al-Irsyad Surabaya. Dengan masa belajar dua tahun, Ma'had Ali Al-Irsyad mengadopsi kurikulum dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Saudi Arabia. Keberadaan STAI Ali Bin Abi Thalib tidak dapat dipisahkan dari Yayasan Al Iskan sebagai lembaga yang memayunginya. Adapun Al Iskan, awalnya memiliki hubungan kuat dengan Al Irsyad Jawa Timur karena peran Cholid Bawazier pada dua lembaga tersebut. Cholid Bawazier adalah mantan pimpinan Al Irsyad Jawa Timur yang diyakini oleh H. Adras Ridwan memiliki jaringan ke Timur Tengah terutama Saudi Arabia (diperlihatkan beberapa dokumen kronologi pendirian STAI Ali Bin Abi Thalib). Menurutnya jaringan Saudi Arabia melalui alumni Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud dan Cholid Bawazier menyambungkan jaringan keuangan yang kuat bagi STAI.

Memahami Budaya dan Kehidupan Sosiologis

Mayoritas penduduk di kota Surabaya secara kultural merupakan suku Jawa dan sebagian suku Madura, golongan etnis lain adalah minoritas mereka terdiri dari orang-orang yang lahir di kota tersebut serta para pendatang dari berbagai kabupaten di sekitar kota Surabaya. Sedangkan disekitar Kecamatan Semampir, pluralitas antarsuku cukup beragam, entitas Arab, Madura, Banjar, Bugis mewarnai keberagaman tersebut (wawancara dengan Camat Semampir, 9 Oktober 2015).

Pendatang dari Madura, jumlahnya sangat banyak. Dalam hal etos perantau tersebut, Kuntowijoyo menjelaskan tradisi merantau orang Madura sudah berlangsung sejak lama (Kuntowijoyo, 2002: 75-82). Keberadaan suku Madura di Kecamatan Semampir adalah mereka yang mengalami urbanisasi. Berbeda

dengan perspektif ilmu kependudukan, Kholidah menjelaskan definisi urbanisasi diartikan sebagai persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Dengan kata lain, perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi. Perpindahan itu sendiri dikategorikan dua macam, yakni: Migrasi Penduduk dan Mobilitas Penduduk, Bedanya Migrasi penduduk lebih bermakna perpindahan penduduk dari desa ke kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di kota. Sedangkan Mobilitas Penduduk berarti perpindahan penduduk yang hanya bersifat sementara atau tidak menetap (Kholidah, 2011:2-5). Bagi orang Madura yang berada di perantauan, mereka akan tetap memegang budaya kekeluargaannya, yakni merasa malu jika perbuatan yang dilakukan itu salah, sopan santun, keramahan, dan “taretan dhibi” (saudara sendiri) (Sakinah, 2011), bermakna satu darah Madura sebagai satu ikatan.

Beberapa informan mengaku berasal dari Kabupaten Sampang, Kecamatan Omben. Sebagian besar masyarakat Madura di Semampir bekerja di kegiatan ekonomi informal, terutama sektor perdagangan barang bekas. Berdasarkan pengamatan, tumpukan besi tua bukanlah benda asing di sepanjang Sidotopo, begitu juga ke daerah Sidotopo Kidul.

Masyarakat Madura dikenal juga memiliki budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Istilah khas disini menunjukkan bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lain. Kekhususan-kultural ini antara lain tampak pada ketaatan, ketundukan, dan kepasrahan mereka kepada empat figur utama dalam kehidupan yaitu *Buppa*, *Babu*, *Guruh*, dan *Ratoh* (Ayah, Ibu, Guru dan Pemimpin Pemerintahan) (Wiyata, 2003:1).

Setelah ketundukan kepada kedua orang tua, aspek penting setelahnya adalah figur *guruh*, yaitu penghormatan pada figur guru, utamanya kyai dan ustadz bagi masyarakat Madura. Mereka adalah orang-orang yang patut dihargai dan dihormati sebaik-baiknya. Dalam hal menyangkut karakter pengendalian faktor luar bagi orang Madura adalah berada pada kyai. Untuk itu, pelibatan kyai dan tokoh agama dalam hal mengelola konflik dan persoalan orang Madura tidak bisa dihindarkan. Unsur pemerintahan, *Ratoh* itu membuktikan loyalitas masyarakat Madura terhadap pemerintah, hal ini dapat dibuktikan sejak zaman Majapahit sampai NKRI masyarakat Madura cenderung tunduk penuh pada pemerintahan yang sah. Mungkin pemberontakan Trunojoyo adalah pengecualian karena perlawanan terhadap Belanda cenderung lebih kental dibanding hubungan antara Kraton Mataram dengan Madura.

Dengan begitu, posisi ulama dalam hal mengatasi berbagai masalah yang melibatkan orang Madura sangat penting dan menentukan. Untuk kasus STAI dan Ali bin Abi Thalib, menurut pengakuan Ustadz Mubarak mereka sudah mencoba mendekati K.H. Abdurahman Navis, tokoh ulama bertenis Madura, namun beliau cukup sibuk untuk banyak terlibat teknis, hanya saja menurutnya pak kyai cukup menjaga jarak untuk tidak banyak memberikan ruang bagi warga Sidotopo Kidul mengancam keberadaan STAI.

Kehidupan Keagamaan

Warga Sidotopo Kidul seperti sebagian besar etnik Madura lainnya adalah Warga NU, mereka beragama Islam yang kental dengan nuansa tradisional, ciri khas dari keislaman tradisional di Indonesia adalah kegiatan maulidan, tahlilan, ziarah kubur, yasinan dan berbagai tradisi yang lekat dengan

kenusantara. Keislaman dengan nuansa tradisi ini sangat melekat pada diri Nahdlatul Ulama yang memang berkomitmen melindungi 'kebiasaan baik' dalam tradisi keagamaan masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, atau bahkan dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan nilai Islam itu sendiri.

"Kita ini beraliran Ahlussunnah Waljamaah, warga NU yang melaksanakan tahlilan, yasinan, ziarah kubur dan maulidan sudah biasa disini" tutur KH. Hafidz. Seperti umumnya warga NU, mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat tradisional seperti berlangsung secara turun menurun.

Di pihak lain, STAI Ali Bin Thalib merupakan wujud lembaga pendidikan Islam yang bermanhaj salafi, seperti tertera dalam visi misi lembaga ini (<http://stai-ali.ac.id/>, diakses 15 Oktober 2015). Perkembangan manhaj salafi di Indonesia cukup fenomenal dan menimbulkan berbagai kontroversi. Posisi berhadapan antara *manhaj ahlussunnah waljamaah* model NU dengan gerakan puritanisme (pemurnian ajaran Islam) berlangsung cukup lama dengan berbagai variasi ketegangan. Titik mula ketegangan dapat dikatakan bermula sejak berdirinya Muhammadiyah (1926) yang mengusung puritanisme cukup menghadirkan gejolak di kalangan Islam tradisional. Hanya saja ketegangan tersebut tidak mewujudkan serius, tidak ditemukan suatu peristiwa kekerasan yang terbuka.

Wahabi dinisbatkan pada pemikiran dan gerakan yang dicetuskan Abdullah Bin Abdul Wahab, kelompok ini akhirnya lebih suka mengaku sebagai manhaj salaf, ahlussunnah. Konsepsi pembaharuan kekinian seringkali merujuk pada Syaikh Nasiruddin Al Bani (Al Islamiyah Edisi 93/Volume II No. 02 TH. 1436 H/2014). Bagi warga Madura, tradisi keagamaan tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri.

Tahlilan, maulidan, ziarah kubur adalah suatu simbol kesalehan bagi masyarakat Madura, karena kalau menghindari tradisi yang sudah turun menurun akan dianggap berislam secara minimal. Istilah "Islam minimalis" seringkali muncul dalam *joke-joke* ceramah banyak ustadz dan kyai di kalangan NU bagi mereka yang tidak qunut atau cenderung abai pada tradisi setempat. Islam minimal dilekatkan terhadap mereka yang mulai meninggalkan tradisi keagamaan masyarakat Madura, tidak mau tahlilan, tidak ziarah kubur, tidak membaca kunut di sholat subuh dan tidak zikir zahar setelah sholat wajib, shalat jumat dengan mengumandangkan adzan sekali, serta meninggalkan *tabarukkan*.

Konflik

Dalam perspektif positivisme konflik itu adalah bagian dari dinamika gerakan struktural (Susan, 2009:40). Dengan mengutip pandangan Simmel (1903), Susan menjelaskan fenomena konflik dipandang sebagai proses sosialisasi, seperti halnya asosialisasi, sosialisasi dianggap bisa melahirkan disosialisasi yaitu individu individu mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya *feeling hostility* secara alamiah. Lingkaran kehidupan sosiologis berbagai individu tiba-tiba saja mengelompok atau kembali kepada kelompoknya karena ketidaknyamanan yang atas tindakan kelompok lain. Dalam hal ini dua kelompok kembali bersitegang karena keyakinan. "Kalau sampai akhir tahun tidak ada tindakan dari pemerintah, gedung STAI (Ali Bin Abi Thalib) ini akan di bakar oleh warga" tegas Haji Sulton (Wawancara dengan Haji Sulton 6 Oktober 2015). Haji Sulton bersama dengan kelompok yang menamakan diri TIM 9 (Tim ini terdiri atas: 1) H Sulton/H Abd Wali, 2) K.H. Ahmad Rosidi, 3) K.H. Murobi, 4) Ustadz Hafidz, Ketua MWC NU Semampir, 5) Ustadz Haji Ismail,

6) Ustadz Badruzzaman, 7) Haji Abd. Rahman, 8) Ustadz Amir Mahmud, 6) H. Mat Barah) adalah penolak keberadaan STAI Ali Bin Abi Thalib. Menurut mereka keberadaan lembaga pendidikan tersebut meresahkan warga, situasi panas itu terjadi karena tidak ada jalan keluar dari ketegangan yang berlarut-larut. Dalam hal menyangkut waktu, untuk sementara Tim 9 dapat menahan warga agar situasinya masih terkendali.

Kronologi yang mengisahkan adanya gesekan tampaknya dimulai sejak meninggalnya seorang tokoh masyarakat (Madura) bernama Haji Mustofa yang seringkali sholat lima waktu di mesjid STAI. Ketegangan terjadi saat tokoh tersebut disholatkan di Mesjid dimaksud sesuai dengan wasiat, namun seperti kebiasaan orang Madura pada umumnya setelah disholati sekalian dibacain tahlil secara bersama-sama di mesjid. Pihak pengurus STAI menolak untuk ditahlili di mesjid tersebut, dan meminta untuk dilakukan di rumah musibah saja. Letupan kecil seperti ini cukup membekas di lingkungan Sidotopo Kidul. "bapak boleh tanyakan langsung kepada keluarga atau warga sekitar disini perlakuan STAI Ali Bin Abi Thalib" ujar Haji Sulton. Dengan demikian indikasi STAI Ali Bin Abi Thalib beraliran salafi wahabi, puritan, semakin kuat dalam penerimaan warga di sekitarnya.

Melalui berbagai dokumen yang diperoleh, STAI Ali Bin Abi Thalib cukup gencar membid'ahkan tradisi keagamaan masyarakat di sekitar ma'had. Kehadiran STAI Ali Bin Abi Thalib memberikan goncangan bagi masyarakat sekitar, menganggap tahlilan, maulidan dan ziarah kubur bid'ah mengandung kemusyrikan melukai hati pengamalnya. Masyarakat marah dan tidak terima. Puncaknya adalah demonstrasi pada tanggal 7 Februari 2015 dimulai pukul 09.00 WIB (Wawancara dengan Haji Sulton, 6 Oktober 2015 disertai bukti dokumen

surat pemberitahuan kepada Polsek Semampir) dengan membentangkan spanduk dan orasi mengecam keberadaan dan aktifitas dakwah STAI. Titik krusial gesekan antara STAI Ali bin Abi Thalib dengan masyarakat di sekitarnya adalah sikapnya terhadap tradisi keagamaan.

Sekian lama ketegangan ini berlangsung, lingkup dan sebaran konflik cukup meluas. Tidak kurang dukungan muncul dari berbagai arah, terutama dari kyai dan santri dari Madura. Hal tersebut dibuktikan dengan ramainya peserta pengajian, maulid dan istighosah yang sempat digelar pasca demonstrasi (dokumentasi video istighosah 14 Maret 2015).

Kasus perseteruan STAI Ali Bin Abi Thalib menarik perhatian banyak pihak, terutama pemerintah, meskipun secara resmi tidak ada pernyataan walikota, namun Gubernur Jatim mengirimkan surat secara resmi kepada Menteri Agama (Surat Gubernur Nomor 300/7280/203.4/2015 perihal Penyelesaian Permasalahan antara STAI Ali Bin Abi Thalib Surabaya dengan Masyarakat Setempat tertanggal 14 Juli 2015). Begitu juga dengan KOPERTAIS Wilayah IV menyampaikan permintaan penanganan yang dilampiri dengan kronologi.

Pemicu ketegangan memuncak adalah terbitnya bulletin Al Iman edisi 205 Tahun kelima No. 9 Rabiul Awal 1436 H. Bulletin tersebut secara khusus membahas tradisi maulidan, yang inti perayaan tersebut, sebagai berikut:

Acara maulidan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in maupun salafus shalih. Untuk itu, perayaan maulid adalah bid'ah.

Orang-orang yang merayakan maulid menyerupai apa yang dilakukan oleh orang nasrani yang merayakan natal, tahun baru atau peringatan tentang kelahiran Yesus Kristus.

Merayakan Maulidan adalah sarana yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan, karena dalam acara maulidan terdapat pujian-pujian yang berlebihan terhadap Rasulullah, sehingga mendudukkan beliau pada posisi Tuhan.

Sikap STAI Ali Bin Abi Thalib yang cenderung anti tradisi seperti ritual sosial yang sering dilakukan oleh warga NU tidak hanya tergambar dari isi bulletin, tetapi dapat dibuktikan melalui tulisan yang termuat di Majalah Adz Zakhiirah Al Islamiyah. Satu artikel yang ditulis Ustadz Fadlan Fahamsyah, Lc., MHI berjudul Perayaan-Perayaan Terlarang menempatkan perayaan maulid, khaul ulama, peringatan as-sura bersama-sama dengan peringatan valentin dan ulang tahun sebagai perayaan terlarang. Berikut perayaan terlarang dilakukan oleh muslim-muslimah: 1) Merayakan Natal, Tahun Baru dan Valentine's Day, 2) Merayakan Haul (peringatan kematian) para wali, kyai dan orang shalih, 3) Mengadakan selamatan kematian 1-7 hari, 40, 100 dan 1000 hari, 4) Merayakan Maulid Nabi, 5) Ritual doa dan kirim doa kepada mayit, 6) Memeringati As-suro, 10 Muharram, 7) Merayakan ulang tahun.

Dalam hal menyikapi ketegangan antarkelompok tersebut, telah dilakukan mediasi oleh berbagai pihak terkait, tidak kurang dari Camat Semampir, Danrem 084/Bhaskara Jaya sampai dengan Gubernur Jawa Timur. *Deadline* warga yang berdemonstrasi untuk menutup atau membubarkan diri pada STAI Ali Bin Abi Thalib dijawab dengan pengumpulan massa 2000-an orang pada kegiatan bertajuk Daurah Ilmiah, menurut pengakuan Ustadz Mubarak, mereka datang untuk menghadiri kegiatan "Daurah Ilmiah" bertajuk "Membendung Radikalisme" tanggal 7-8 Mei 2015 di aula STAI. Sejatinya menurut beliau *daurah* akan dilaksanakan selama empat hari, tetapi Kapolres meminta

cukup dua hari saja. "Loh kita ini punya massa juga Pak, itu yang mau datang 10.000 orang, tapi saya minta 2000 orang saja" tutur Ustadz Mubarak. Momentum kegiatan *daurah* ini menarik, karena bersamaan dengan batas *deadline* yang disampaikan oleh Tim 9 dan H. Adras (Haji Adras merupakan Sekjen DPP Ikatan Keluarga Madura, adik dari Ketua Tim 9 Haji Sulton, keduanya secara tertulis menandatangani batas waktu permintaan pembubaran). Di sisi lain, menjelang batas waktu tersebut pihak STAI tampak seperti sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan bentrok fisik dengan penentangannya.

Sebelum batas waktu yang diminta oleh warga Sidotopo Kidul agar STAI dibubarkan atau membubarkan diri 7 Mei 2015, telah terjadi pertemuan penting pada 1 April 2015 di Makorem 084/Bhaskara Jaya. Draf perdamaian sempat diajukan oleh Warga Sidotopo Kidul berupa nota kesepahaman, namun proses tersebut *deadlock* tanpa ada solusi sama sekali. Ada banyak mediasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, MUI, Camat dan Walikota sebelum masa waktu yang ditentukan untuk pembubaran. Berdasarkan penjelasan dan kronologi yang ada, dapat dipahami bahwa hampir semua langkah yang dilakukan tidak menemui jalan keluar.

Coser (1956) (Paloma, 1994:113-117) menegaskan bahwa kohesi sosial dalam kelompok mirip sekte itu tergantung pada penerimaan secara total seluruh aspek-aspek kehidupan kelompok. Untuk kelangsungan hidupnya kelompok "mirip-sekte" dengan ikatan tangguh itu bisa tergantung pada musuh-musuh luar. Konflik dengan kelompok-kelompok lain bisa saja mempunyai dasar yang realistis, tetapi konflik seringkali juga sering berdasar atas isu yang non-realistis. Konflik realistik didasarkan atas munculnya kekecewaan atas tuntutan tuntutan khusus terhadap hal yang

menguntungkan terhadap obyek (yang akhirnya mengecewakan), sedangkan non realistik adalah pertentangan yang tidak berasal dari hubungan antagonistik melainkan hanya untuk meredakan ketegangan dari satu pihak, misalnya pembalasan dendam atas ilmu hitam (Lewis A. Coser, dikutip oleh Astrid Ivonna pada <http://www.astalog.com/2603/apa-yang-dimaksud-dengan-konflik-non-realistis.htm>, diakses 1 Juni 2016, 14.40 WIB). Dengan demikian, pola konflik antara dua pihak di STAI dan Jamaah NU di Semampir tampak seperti pola realistik, berbagai motif kekecewaan warga Sidotopo Kidul terhadap STAI Ali Bin Abi Thalib disebabkan tuntutan terhadap keterbukaan mesjid dan yayasan terhadap amaliyah di sekitarnya. Problem mendasar untuk mencari penyelesaian adalah aspek kompromi kedua pihak yang terlalu kecil dengan tidak adanya kesepakatan dari pertemuan ke pertemuan, sedangkan penguatan ke dalam terus dilakukan.

Aspek potensial terjadinya konflik terletak pada sikap keseharian pihak STAI, terutama dalam hal metode dakwah salafi yang mereka kembangkan. Ada tiga output dakwah yang harus benar-benar hati-hati, 1) terbitan bulletin Al Iman, materi yang disajikan jangan sampai menciptakan momentum serupa, 2) siaran radio Al Iman, 3) komunikasi dakwah lisan yang mungkin saja tersampaikan pada khotbah jumat.

Hambatan dan Potensi Penyelesaian Kasus

Hambatan utama dalam penyelesaian konflik adalah tidak adanya kesepahaman tentang perbedaan manhaj (cara pandang terhadap ajaran Islam). Masing-masing pihak enggan mendialogkan pemahaman keagamaan masing-masing. Pihak STAI merasa tidak ada yang salah dengan cara mereka

berdakwah, karena mereka yakin bahwa yang mereka lakukan itu benar, segala tindakan adalah panggilan dakwah. Begitu juga dalam hal teritorial, selama ini mereka berada dalam otonomi pendidikan yang cenderung eksklusif dan menganut paham yang berbeda dengan warga sekitar. Posisi berhadapan tidak bisa dihindari karena para kyai dan ustadz di lingkungan Sidotopo Kidul Kecamatan Semampir cenderung menyampaikan dakwah dengan berbagai cara yang lekat dengan tradisi di masyarakat Madura.

Dalam pandangan Coser (Paloma, 1994:117) kondisi-kondisi yang memengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok akan membantu memantapkan batas-batas struktural. Jika konflik berkembang dalam hubungan-hubungan sosial yang intim, maka pemisahan antara konflik realitis dan nonrealistis lebih sulit untuk dipertahankan. Karena semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang yang sudah tertanamkan makin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedangkan pada hubungan-hubungan sekunder, seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan relatif dapat lebih bebas diungkapkan. Memaknai konflik antarmereka kedua pihak lebih mudah dipahami karena keintiman dua pihak tidak terjalin, meskipun upaya dari STAI yang berusaha mengurangi ketegangan dengan memberikan bantuan pada kegiatan perayaan maulid, ternyata tidak terlalu memberikan dampak terhadap hubungan keduanya. Jadi, mengurai aspek realistik dan nonrealistic dalam konflik antara dua kelompok tersebut tidak relevan karena jalinan keintiman sosial antarindividu juga tidak terjalin.

Pihak warga menginginkan sesuatu yang mustahil dipenuhi oleh pihak STAI, satu dari sekian tuntutan agar

kampus dan yayasan terbuka terhadap warga sekitar, terutama penerimaan amaliyah yang dalam pandangan salafi wahabi adalah bid'ah sulit diwujudkan. Sedangkan di sisi lain, warga terlanjur merasa bahwa pihak STAI mengancam kehidupan keberagamaan mereka, sehingga kalaupun islah, syarat yang diminta adalah keterlibatan warga ke dalam yayasan.

Ti adanya titik temu dapat dipahami dari pemahaman kedua pihak terhadap objek konflik. Sama sekali berbeda, permintaan warga dianggap oleh pihak STAI sebagai upaya perampasan dan intervensi kepada hak milik yayasan dan kemandirian yayasan Al Iskan. "mereka itu katanya sudah mengkapling-kapling tanah disini" ujar ustadz Maryono. Opini pengkaplingan area yayasan memang tampak seperti pernyataan yang kurang bisa diterima akal karena berdasarkan wawancara dan arah penjelasan tidak memperlihatkan motif perampasan aset fisik sebagai incaran.

Hambatan berikutnya adalah meluasnya informasi gesekan, bahkan sampai ke Kabupaten Rembang, seperti yang tertera dalam dokumen dukungan sebagian besar pesantren di Jawa Timur mendatangi persetujuan pembubaran. Tidak kurang dari pesantren Sidogiri sampai dengan Sarang (Kabupaten Rembang) melalui Gus Najih ikut menandatangani persetujuan pembubaran. Menurut pengakuan H Sulton dan teman-temannya, Gubernur Jawa Timur pun membuka peluang pembubaran hanya saja untuk mencari celah hukumnya sangat sulit.

Potensi penyelesaian konflik antara STAI Ali Bin Abi Thalib dengan Warga Sidotopo Kidul adalah rasa *ukhuwah islamiyah* masih dapat dirasakan. Ada sebuah asa yang sulit dihindari tentang persatuan Islam, hanya saja seringkali cara menyatukannya sulit karena berbeda sikap sangat tegas dalam hal tradisi.

Karena perbedaan pandang dan kekakuan pada pemahaman terutama pada tradisi sosial keagamaan, bisa dipastikan sulit untuk melakukan mediasi melalui aspek tersebut. Meskipun dalam pengakuan pihak STAI mereka sudah cukup banyak membantu materi kepada warga sekitar, mulai dari sumur bor, bantuan sembako dan uang untuk kegiatan Maulidan.

Hal yang paling mungkin dilakukan adalah mengintervensi "waktu", pihak mediator dapat memperlambat atau mempercepat ledakan antara kedua belah dengan suatu sistem kontrol sepernuhnya oleh negara. Wujud dialog, atau mengalihkan konsentrasi konflik dapat dilakukan. Posisi penyuluh keagamaan cukup vital untuk mengembangkan informasi positif antarpihak. Pihak kemenag atau kecamatan selalu berupaya menyampaikan informasi yang positif tentang STAI kepada warga, begitu juga sebaliknya. Jadi dalam hal mengelola keadaan ini, penting untuk memahami bahwa manajemen konflik itu bertujuan untuk memoderasi atau memberadatkan efek-efek konflik tanpa perlu menangani akar konflik dan sebab-sebabnya (Ruberstein, 1996:1) dalam (Susan, 2009:127), sehingga yang perlu dibangun ke depan adalah aspek potensial *islah* yang tidak lagi mengurai sebab musabab.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, ada sejumlah simpulan yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Masalah perseteruan sebab khilafiyah antara warga bertradisi NU terutama beretnis Madura dengan STAI Ali Bin Abi Thalib yang beraliran Salafi (Wahabi) di Sidotopo Kidul tidak bisa dipandang remeh. Upaya mediasi yang cenderung seremonial tidak memberikan dampak terhadap perdamaian.

2. Masing-masing pihak sangat memahami kalau mereka berbeda dalam hal pemahaman agama, meskipun seagama, sulit dicarikan titik temu. Pengaruh konflik aliran di berbagai tempat, serta ketegangan dialog Sunni vs Wahabi adalah unsur penguat perseteruan di Sidotopo Kidul.
3. Karakter gerakan salafi yang keras dan (radikal) bertemu dengan karakter etnis Madura dan warga Surabaya yang fanatik dalam hal keagamaan tradisional. Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mengendalikan perseteruan ini.
4. Situasi ketegangan kedua belah belum dapat dikatakan mereda. Pihak STAI Ali Bin Abi Thalib, masih cukup percaya diri bahwa mereka juga punya massa, namun di sisi lain **banyaknya dukungan dari berbagai pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah, ledakan konflik hanya menunggu momentum.**
5. Beberapa hal sehubungan dengan solusi rekonsiliasi belum tergalai dengan baik, misalnya saat ada tawaran draf perdamaian yang mestinya terjadi tawar menawar, malah cenderung tertolak dari awal.
6. Pembubaran STAI Ali Bin Abi Thalib adalah kajian tersendiri, jika itupun diperlukan karena alasan-alasan keselamatan bersama. Pihak STAI Ali Bin Abi Thalib cenderung pasrah terhadap penyelesaian yang penting tidak dibubarkan atau dipindahkan, hanya saja kesepakatan antara kedua pihak tidak tercapai.
7. Konflik tidak dapat dihilangkan, namun bisa diintervensi. Intervensi pada waktu, sebaran dan dampaknya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil, pembahasan dan simpulan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

1. Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama perlu untuk meneruskan langkah-langkah yang sudah ditempuh dengan terus berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Komunikasi intens merupakan instrument penting untuk memantau perkembangan situasi di lapangan.
2. Kementerian Agama Kota Surabaya perlu lebih aktif memahami dan melakukan pendekatan masalah STAI Ali Bin Abi Thalib dengan warga Sidotopo Kidul.
3. Mengingat kentatnya perseteruan, Ditjen Pendis perlu menugaskan tim khusus untuk mendalami berbagai kemungkinan terkait keamanan STAI Ali Bin Abi Thalib. Jadi jika pemindahan penting dilakukan perlu dilakukan kajian tersendiri.
4. Tidak ada istilah selesai dalam hal konflik. Semua pihak telah bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Pemantauan Situasi perlu terus menerus dilakukan terutama oleh pemerintah Kota Surabaya sampai pada tingkat Kelurahan dan Kementerian Agama,
5. Penyuluh Kementerian Agama cukup vital dalam hal membangun komunikasi pada kedua belah pihak. Penyuluh yang ada sudah cukup baik bekerja, namun perlu ditambah tenaga dan materi resolusi konflik perlu diberikan.
6. Mediasi melalui pendekatan personal dapat membangun kepercayaan kepada pemerintah. Meskipun mediasi secara seremonial tetap dapat dilakukan.

Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin, 2006. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, W, Jhon, 1994. *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, California: SAGE Publications, Inc.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kuntowijoyo. 2002. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Lubiyana, Khalidah., Nugraha, Rendra, Dwi., Widi, Rahma., Al Siddiq, Huda, Imamul., Tiffan, Denis, Pitaloka, Rahmawati, Dian., Noviandini, Diah., Noor Ifansyah., Raditya, Dion 2011. *Laporan Penelitian Sosialogi Perkotaan, Segregasi*. Universitas Airlangga
- Majalah Adz Zakhairah Al Islamiyah Edisi 93//Volume II No. 02 TH. 1436 H/2014
- Poloma, M, Margareth 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rifai, Mien Ahmad. 2007. *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta: Pilar Media
- Susan, Novri, 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Silla, Adlin., Mufid, A. Syafi'I., Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, , 2010. *Gerakan Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama.
- Wiyata, A. Latif, 2003. *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura* . Jakarta: CERIC-FISIP UI, 2003.

Website:

<http://stai-ali.ac.id/>

<http://blog.umy.ac.id/sakinah/2011/12/31/perilaku-komunikasi-antar-budaya-suku-madura>

<http://dispendukcapil.surabaya.go.id/index.php>

<http://basundoro-fib.web.unair.ac.id/artikel.html>